

Top Nasional: Mabes Polri Turun Tangan Usut Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PDIP Minta Manuver Gugatan Penundaan Pemilu Diselidiki

TEMPO.CO, Jakarta -Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Mabes Polri turun tangan menyelidiki penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara dengan menurunkan tim labfor dan Inafis. Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada manuver besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Berikut ringkasannya:1. Mabes Polri Selidiki Penyebab Kebakaran Depo Pertamina PlumpangMabes Polri turun tangan menyelidiki penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim sudah diterjunkan ke lapangan. Menurut dia tim labfor telah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)."Langkah yang dilakukan hari setelah clear dari HSE (Health Safety Environment) dari Pertamina baru kita olah TKP. Jumlah anggota sementara 9 orang. Alat yang kita gunakan toolkit kebakaran, drone, alat ambil sampel abu arang dan gunakan teknologi remote sensing," kata Dedi pada Sabtu 4 Maret 2023.Selain menyelidiki penyebab kebakaran, Dedi mengatakan Mabes Polri membantu proses evakuasi dan identifikasi korban. Tim DVI dan Inafis Polri, kata dia, juga sudah diturunkan pada hari ini."Tim inafis hari ini memback-up Polda Metro untuk olah TKP bersama labfor dan bersama tim DVI Dokkes untuk melakukan proses identifikasi," ujar dia melalui keterangan tertulis. Dedi menuturkan Polri telah mengamankan sekitar area kebakaran. Hal itu bertujuan untuk mencegah dari kejadian yang tidak diinginkan. "Polri melakukan pengamanan terhadap lokasi kebakaran baik di Depo Plumpang, maupun lokasi rumah warga terdampak yang ditinggal mengungsi," kata Dedi.Selanjutnya, Dedi mengatakan Mabes Polri sudah mendirikan sejumlah posko untuk membantu penanganan musibah kebakaran depo Pertamina Plumpang tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah posko tanggap darurat pelporan orang hilang. "Mendirikan dapur umum di Pos Polisi oleh Sat Brimobda PMJ (Polda Metro Jaya) dan membantu posko pengungsian BPBD," kata

dia.2. Sekjen PDIP Sebut Manuver Gugatan Tunda Pemilu 2024 ke PN Jakpus Mesti Diselidiki

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada manuver besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan manuver itu harus diselidiki dari mana sumber kekuatannya."Untuk itu, menghadapi manuver-manuver dengan kekuatan yang harus kita selidiki dari mana kekuatan itu, yang mencoba untuk menggunakan hukum sebagai alat yang akan merombak seluruh tatanan tatanan demokratis yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Hasto saat memberi sambutan di acara PDIP di Taman Halaman Banteng, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023.Hasto menegaskan amanat konstitusi mengamanatkan bahwa pemilu hasil harus dijalankan setiap 5 tahun.Hasto mengatakan ini berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024. Putusan ini berkaitan dengan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dia menyebutkan, keputusan tersebut merupakan keputusan yang melawan amanat konstitusi."Ada sesuatu kekuatan besar di balik peristiwa pengadilan PM Jakarta Pusat tersebut yang mencoba untuk menunda Pemilu 2024," ujar Hasto. Dia mengatakan keputusan PN Jakpus itu sangat mengegerkan masyarakat Indonesia, dan menyebut tuntutan Partai Prima merupakan aksi sepihak."Adanya aksi sepihak dari satu partai, yang kita pun belum begitu kenal yang namanya Partai Prima," kata Hasto.Hasto mengatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah jelas mengatur sengketa yang berkaitan dengan partai politik dan peserta pemilu hanya dilakukan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). "Karena Komisioner KPU adalah pejabat tata usaha negara," ucap Hasto.

Pilihan Editor:PN Jakpus Putuskan Penundaan Pemilu, Pakar Hukum: Aneh dan Melanggar Yurisdiksi